



PERTEMUAN NASIONAL LUAR BIASA PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT (PPM)



Ksatria Tiwiskrama
**HAMEMAYU HAYUNING
RAWANA**



© Priatna
Kabupaten Jombang, Jawa Timur

GARIS - GARIS BESAR PROGRAM KERJA PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT PERIODE 2021 - 2026

1-Jun-24

Garis - Garis Besar Program Kerja
PPM th 2021-2026

Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) adalah organisasi kerjasama nasional yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, untuk membangkitkan dan menguatkan prakarsa, peranserta, dan swadaya masyarakat dalam pemenuhan minat, kebutuhan, dan kepentingannya.

PPM lahir dari Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (P3M) Propinsi DIY dan Jawa Tengah, yang merupakan program kerja sama antara Lembaga Studi Pembangunan (LSP) Jakarta dengan Departemen Agama RI dengan pelaksana lapangan Dhworowati Institute Yogyakarta. Secara bertahap program ini mampu mengembangkan kegiatannya hampir di seluruh wilayah kedua propinsi ini, sehingga semakin memastikan keyakinan bahwa pola, strategi dan pendekatan operasional P3M cukup layak untuk terus dilaksanakan. Hal ini mendorong pengembangan program ke wilayah propinsi lainnya, yaitu PPM di Jawa timur, Bali, Jawa barat, DKI Jakarta, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pada tanggal 31 Januari 1985, merupakan lahirnya PPM dengan tandai Pertemuan Nasional I di Kaliurang Yogyakarta; berakta yayasan Nomor 27 tanggal 5 Juni 1987 pada Notaris Yudo Paripurno, S.H. Selanjutnya PPM Nasional mendaftarkan kepada Departemen Dalam Negeri sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) tingkat nasional, dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1985

Pada tanggal 31 Januari 1985, merupakan lahirnya PPM dengan tandai Pertemuan Nasional I di Kaliurang Yogyakarta; berakta yayasan Nomor 27 tanggal 5 Juni 1987 pada Notaris Yudo Paripurno, S.H. Selanjutnya PPM Nasional mendaftarkan kepada Departemen Dalam Negeri sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) tingkat nasional, dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1985.

Sebagai organisasi kemasyarakatan (civil society group) PPM menaruh keprihatinan dan kepedulian terhadap keseluruhan permasalahan structural dan cultural, yang secara garis besar dapat dicirikan dalam tiga permasalahan pokok antara lain permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan, rapuhnya penjembitan hubungan antar sub kultur, khususnya antar etnik, antar ruang, antar lapis dan antar corak penghayatan keagamaan, dan kegagalan dalam mengembangkan partisipasi proaktif dalam pembangunan. Maka PPM mempunyai peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat guna membangun kesejahteraan dan dalam membangun kemandirian perekonomian sangatlah nyata..

Kelembagaan yang ada harus mengimplementasikan tujuan Pusat Peranserta sebagaimana tercantum dalam AD ART Pusat Peranserta Masyarakat (PPM). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya upaya upaya konstruktif, yakni menjalankan roda organisasi Pusat Peranserta Masyarakat secara sistimastis

VISI PUSAT PERANSERTA MASYARAKAT

“Menjadikan PPM sebagai organisasi gerakan yang mendorong terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan dan atau sistem/strukturmasyarakatan yang mengacu pada kepentingan rakyat sebagai implementasi tugas kekhalfahan dibiuni.

PENGERTIAN

“Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) merupakan panduan dasar pelaksanaan kegiatan organisasi yang berdasarkan AD/ART Pusat Peranserta Masyarakat yang telah ditetapkan.

KEDUDUKAN

Garis Garis Besar Program Kerja Organisasi akan dijabarkan dalam dalam program kerja.

Garis Garis Besar Program Kerja Organisasi akan di evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan yang terj

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan program kerja ini dimaksudkan dan bertujuan guna menjadi acuan ataupun landasan riil dalam pelaksanaan program kerja Pusat Peranserta Masyarakat.

ARAH SASARAN DAN STRATEGI

Garis Garis Besar Organisasi diarahkan pada peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kearah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara profesional dan peningkatan kemampuan kewirausahaan berdasarkan disiplin ilmunya dan berkepedulian sosial yang tinggi.

POKOK POKOK KEBIJAKAN ORGANISASI

1. Mendorong revitalisasi dan reaktualisasi berbagai bentuk kebijakan dan per- Undang-Undangan yang memberikan peluang partisipasi dan intervensi rakyat dalam pembangunan wilayahnya ;
2. Membangun dan mengembangkan kebudayaan dan atau system/struktur yang mengabdikan pada pluralisme dan kebangsaan
3. Membangun sistem perekonomian yang berdasar pada kepeberpihakan pada kerakyatan dan keadilan bagi rakyat.
4. Meningkatkan mutu SDM dan keberdayaan masyarakat dalam persiapan menghadapi pengaruh globalisasi dan trans-kultural serta memperkokoh nasionalisme ;
5. Memberikan stimulan terhadap peranan dan fungsi lembaga-lembaga social kemasyarakatan untuk memperkuat modal social sebagai nilai dasar pengembangan potensi insaniah ;

6. Menggali dan mengembangkan kearifan local (*local wisdom*) sebagai warisan budaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik-konflik social kemasyarakatan
7. Mendorong penegakkan supremasi hukum untuk menciptakan ketertiban social sebagai prakondisi bagi perwujudan demokratisasi yang islamis ;
8. Mendorong usaha-usaha bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) dalam arus utama gerakan kebudayaan dan stimulator peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam menjalankan amanah desentralisasi social, ekonomi dan politik ;
9. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung peningkatan peran dan fungsi UKM dan sector informal dalam pembangunan ekonomi.
10. Menggalang kerjasama yang sinergis secara cultural maupun structural dengan pihak-pihak yang memiliki kesamaan ideologis sebagai wahana implementasi credo “penghubung antar sub-kultur” demi kemashalahatan umat ;

1. Mendorong revitalisasi dan reaktualisasi berbagai bentuk *Kebijakan dan Per-UU-an* yang memiliki dampak kerberpihakan kehidupan masyarakat
2. Membangun dan mengembangkan *kebudayaan dan atau sistem/struktur kemasyarakatan* yang humanistic dan egaliter ;
3. Membangun dan mengembangkan demokrasi ekonomi melalui penciptaan lembaga keuangan dan usaha mandiri di pedesaan dan perkotaan sehingga terwujudnya kemandirian ekonomi .
4. Meningkatkan kualitas mutu *SDM* melalui peningkatan kualitas sistem dan proses pendidikan, (Pendidikan, ketrampilan, keahlian dan intelektualitas) dan keberdayaan masyarakat
5. Memberikan stimulan terhadap peranan dan fungsi *lembaga social-kemasyarakatan* dalam mewujudkan tata social, ekonomi dan kebudayaan alternatif yang mengacu pada kepentingan rakyat ;

6. Menggali dan mengembangkan *kearifan budaya local* sebagai basis alokasi sumberdaya pembangunan yang efektif ;
7. Meningkatkan *ekonomi kerakyatan* bagi peningkatan akses dan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat miskin dan sector informal ;
8. Menggalang *simbiosys mutualism* dengan pihak-pihak lain yang memiliki komitmen dan integritas yang sesuai dengan *platform* perjuangan organisasi ;
9. Menciptakan kesetaraan gender untuk mengoptimalkan kekhalfahan manusia di bumi.

TUJUAN

1. Mendorong revitalisasi dan reaktualisasi berbagai bentuk kebijakan dan per- Undang-Undangan yang memberikan peluang partisipasi dan intervensi rakyat dalam pembangunan wilayahnya ;
2. Membangun dan mengembangkan kebudayaan dan atau system/struktur yang mengabdikan pada pluralisme dan kebangsaan
3. Membangun sistem perekonomian yang berdasar pada kepeberpihakan pada kerakyatan dan keadilan bagi rakyat.
4. Meningkatkan mutu SDM dan keberdayaan masyarakat dalam persiapan menghadapi pengaruh globalisasi dan trans-kultural serta memperkokoh nasionalisme ;
5. Memberikan stimulan terhadap peranan dan fungsi lembaga-lembaga social kemasyarakatan untuk memperkuat modal social sebagai nilai dasar pengembangan potensi insaniah ;
6. Menggali dan mengembangkan kearifan local (*local wisdom*) sebagai warisan budaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik-konflik social kemasyarakatan ;

7. Mendorong penegakkan supremasi hukum untuk menciptakan ketertiban social sebagai prakondisi bagi perwujudan demokratisasi yang islamis ;
8. Mendorong usaha-usaha bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) dalam arus utama gerakan kebudayaan dan stimulator peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam menjalankan amanah desentralisasi social, ekonomi dan politik ;
9. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung peningkatan peran dan fungsi UKM dan sector informal dalam pembangunan ekonomi.
10. Menggalang kerjasama yang sinergis secara cultural maupun structural dengan pihak-pihak yang memiliki kesamaan ideologis sebagai wahana implementasi credo “penghubung antar sub-kultur” demi kemashalahatan umat ;

SASARAN YANG DI HARAPKAN

1. Terwujudnya berbagai penyempurnaan kebijakan dan per-Undang-Undangan yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan ;
2. Terwujudnya kebudayaan dan atau struktur/system social kemasyarakatan yang kondusif bagi perwujudan pluralisme dan kebangsaan ;
3. Terwujudnya proses dan tata kelola dunia usaha yang mandiri dan berkeadilan
4. Terwujudnya mutu SDM dan keberdayaan masyarakat yang siap menghadapi dan memenangkan persaingan global dan mampu mengeliminir dampak negatif globalisasi dan trans-kultural ;
5. Terwujudnya peran dan fungsi lembaga-lembaga social kemasyarakatan yang menempatkan modal social sebagai basis inter-relasi antar sub-kultur yang tidak diskriminatif ;
6. Tergali dan berkembangnya kearifian local (*local wisdom*) yang terinternalisir dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selaras, serasi dan seimbang ;

7. Terwujudnya supremasi hukum sebagai dasar terbangunnya ketertiban social dan mendorong proses desentralisasi di segala bidang kehidupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Terbangunnya tata pemerintahan yang baik dalam mendorong peranan fungsional swasta dan masyarakat sebagai prasyarat bagi pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien ;
9. Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang mampu memberikan peningkatan daya saing Nasional dan perbaikan kondisi makro, meso dan mikro perekonomian nasional secara adil dan merata ;
10. Terwujudnya berbagai bentuk kerjasama fungsional dengan kesamaan ideologis sebagai manifestasi terbangunnya hubungan antar sub-kultur yang mewadahi gerakan kebudayaan
11. Memotivasi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya perempuan yang produktif.

KEKUATAN

(S)

1. Memiliki cabang di berbagai wilayah/daerah ;
2. Telah banyak menghasilkan karya-karya sosial-kemasyarakatan ;
3. Telah dikenal luas oleh berbagai kalangan ;
4. Relatif banyak kader-kadernya telah menempati posisi-posisi strategis ;
5. Terjalinnnya komunikasi internal dan silaturahmi yang kontinnyu ;
6. Dukungan potensial sumberdaya manusia internal dan eksternal ;
7. Sebagai Ormas yang memiliki keberpihakan yang jelas kepada kaum *ahluafifa* dan *mustadafin* ;
8. Memiliki jaringan kerja dan ekonomi yang luas baik antar kader PPM atau dengan pihak-pihak lain ;

TANTANGAN (W)

1. Maraknya kemunculan LSM-LSM dengan ideologi pasar dan pragmatis ;
2. Problematika Pembangunan yang semakin mengemuka dan solusi instan ;
3. Paham ke da erahan (primordialisme) yang semakin menguat ;
4. Tingkat daya saing dan resiko negara yang rendah dan fenomena korupsi yang sistemik ;
5. Pemaknaan Demokrasi yang kearah kebebasan yang tidak terkontrol
6. Kesenjangan social dan ekonomi yang semakin melebar dan tingkat moralitas yang rendah;
7. Menggejalanya perilaku hedonisme, konsu- merisme dan *westernisasi* ;

PELUANG (O)

1. Sumberdaya sekarang lebih banyak di daerah (Otonomi Daerah) ;
2. Sumberdaya Manusia (SDM) Daerah masih perlu pendampingan ;
3. Program Pengentasan kemiskinan saat ini sebagai focus Program Pemerintah ;
4. Peralihan Pemerintahan yang baru
5. Orientasi Keberpihakan Pemimpin pada kepentingan rakyat kurang jelas ;
6. Demokratisasi (desa) belum terwujud sesuai dengan aspirasi masyarakat ;
7. Mewujudnya masyarakat informasi / digital ;
8. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mulai menjadi kecenderungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat;

KELEMAHAN (W)

1. Stabilitas politik dan keamanan belum kondusif;
2. Maraknya kemunculan LSM-LSM dengan ideologi pasar dan pragmatis ;
3. Problematika Pembangunan yang semakin mengemuka dan solusi instan ;
4. Paham kedaerahan (primordialisme) yang semakin menguat ;
5. Tingkat daya saing dan resiko negara yang rendah dan fenomena korupsi yang sistemik ;
6. Pemaknaan Demokrasi yang kearah kebebasan yang tidak terkontrol
7. Kesenjangan social dan ekonomi yang semakin melebar dan tingkat moralitas yang rendah;
8. Menggejalanya perilaku hedonisme, konsumisme dan *westernisasi* ;

1. Bidang sosial

1. Masih seringnya terjadi konflik social (horizontal dan vertical) , baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pihak pemerintah ;
2. Menipisnya rasa kebangsaan (Nasionalisme) atau masih kenatalnya primordialisme, yang akan menggoyahkan sendi-sendi integrasi nasional (NKRI) ;
3. Semakin mahalnya biaya pendidikan yang menyulitkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu ;
4. Jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang besar, rata-rata tingkat pendidikan dan kesehatan relatif rendah, yang mengakibatkan terjadinya *lost generation*
5. Ketidakmampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja (pengiriman TKW dengan bekal pendidikan dan ketrampilan minimal) ; Menurunnya moral (dekadensi moral) yang luas.

2. Bidang Ekonomi

1. Perekonomian Indonesia masih tidak kompetitif baik bagi kegiatan investasi maupun perdagangan, iklim bisnis masih belum kondusif
2. Semakin besarnya jumlah rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan daya beli rendah (*low purchasing power*); Kebijakan ekonomi yang tidak memihak rakyat miskin dan atau pelaku ekonomi UKM dan sector informal (*Growth without pro poor*)
3. Program-program pembangunan belum banyak menyentuh kepentingan dasar masyarakat (*shopping list*)
4. Pola kerja perburuan rente ekonomi (*rent seekers*) dari aparatur birokrasi dan legislative yang meningkatkan biaya transaksi masyarakat ;
5. Belum efektifnya pelaksanaan dan sangsi dari UU Persaingan Usaha dan Anti Monopoli ;
6. Masih relatif lebarnya kesenjangan ekonomi yang terjadi antar golongan maupun antar daerah / wilayah ;

3. Bidang Hukum

1. Masih Lemahnya Penegakkan Hukum (praktek mafia peradilan);
2. Banyak kasus – kasus yang melanggar hak – hak rasa keadilan di masyarakat tingkat bawah, rakyat tertindas jauh rasa keadilan
3. Perilaku *moral hazard* dari aparatur pemerintah dan legislative dalam penyusunan Kebijakan dan Per-Undang-Undangan (Praktek KKN) ;
4. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat

4. Bidang Energi Lingkungan

1. Lingkungan hidup belum menjadi arus utama (*mainstream*) dalam kegiatan pembangunan (*complementary Issues*).
2. Banyak kasus-kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan besar tidak pernah ditemukan penyelesaiannya secara konkret dan berkeadilan ;
3. Eksploitasi Sumber Daya Alam secara berlebihan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata
4. Eksternalitas negatif sebagai dampak eksploitasi SDA lebih banyak menjadi beban masyarakat
5. Masih terjadinya kerusakan Sumber Daya Alam secara massif (*illegal logging ; overfishing ; deforestasi ; abrasi pantai, salinasi dsb*)
6. Semakin mengemukanya konflik atas pemanfaatan SDA khususnya di sektor – sektor pertambangan, perkebunan;

FOKUS PROGRAM KERJA

1. Meningkatkan kualitas SDM , Institusi/ pemerintahan, dan Pengembangan Teknologi
2. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sistem dan proses ekonomi, politik, dan sosial.
3. Revitalisasi Organisasi Pusat Peranserta Masyarakat

REVITALISASI ORGANISASI

1. Melakukan herregistrasi keanggotaan; menyusun data base anggota; menyusun profil anggota dan pengurus; konsolidasi organisasi;;
2. Pengembangan data dasar mengenai potensi dan daya saing daerah;
3. Memberikan fasilitasi dan sinergi pemanfaatan pengalaman dan kepakaran anggota.
4. Konsolidasi dan ekstensifikasi badan otonomsesuai potensi dan peluang yang dimiliki, melalui pengembangan usaha mandiri ataupun kemitraan dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas.
5. Merevitalisasi badan – badan otonon PPM antara lain APGKI, APKLI, PPKUW, PPW, AMARTA, MEP, MIP,SANKERTA, DERAP, JPSI, KOPERMAS.

1. Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan secara berjenjang, sistematis, metodologis dan inovatif.
2. Mengembangkan karir struktural dalam organisasi PPM

1. Memberikan bantuan dan pembelaan terhadap masyarakat karena hak – haknya sebagai warga negara dirampas atau dilanggar/tidak dipenuhi.
2. Melakukan intervensi logis pada upaya – upaya menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat.;

KEMITRAAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

1. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsionalisasi lembaga-lembaga social bersama modal sosialnya sebagai wahana inter relasi social kemasyarakatan
2. Mendorong pengembangan modal social sebagai instrumen dari norma dan etika inter relasi social masyarakat ;
3. Mewujudkan kerjasama fungsional yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan ideologis dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat bangsa ;
4. Mendorong peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam posisi yang sejajar dengan peran pemerintah dalam pembangunan (Kemitraan fungsional) ;

PENGEMBANGAN DAN KEMANDIRIAN USAHA MASYARAKAT

1. Menumbuhkan dan mewujudkan usaha mandiri di sektor ekonomi, antara lain agrobisnis, perkebunan kemaritiman, pertambangan, manufaktur, elektronik, perdagangan, telekomunikasi, peternakan, agroindustri, jasa kesehatan, jasa konstruksi, untuk menjamin ketersediaan sumber dana bagi operasionalisasi organisasi dan untuk memajukan ekonomi masyarakat Indonesia.
2. Menghidupkan kegiatan-kegiatan sektor riil untuk mengembangkan ekonomi rakyat.
3. Membangun konsep reposisi peran UKM dalam perbaikan kondisi makro, meso dan mikro ekonomi Nasional

1. Mewujudkan learning dan knowledge base society umat berdasar paradigma pembangunan peradaban dan pemberdayaan .
2. Mendukung *fund rising* bagi perluasan akses masyarakat miskin/marjinal pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi ;
3. Pelatihan berbagai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha diselenggarakan bagi masyarakat yang membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk memasuki dunia kerja.

1. Publikasi gagasan, konsep – konsep pemberdayaan ekonomi rakyat dari tokoh – tokoh PPM melalui media cetak dan elektronik
2. Memaksimalkan media cetak dan elektronik/ media sosial sebagai alat untuk melakukan sosialisai program dan kegiatan PPM ke masyarakat.

1. Memberikan asistensi kepada penyelenggara pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dilakukan untuk pembangunan dalam berbagai sektor
2. Mewujudkan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam posisi yang sejajar dengan peran pemerintah dalam pembangunan (Kemitraan fungsional) ;
3. Memberikan dampingan dan asistensi masyarakat yang meliputi sektor ekonomi, sosial, budaya, hukum dll,

TERIMA KASIH